

**ANALISIS TATA KELOLA BUMDES TIRTA ARUM DESA
SUMURJOMBLANGBOGO DITINJAU DARI PRINSIP *ISLAMIC*
*CORPORATE GOVERNANCE***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

KHOIRULANAM

NIM 4121162

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**ANALISIS TATA KELOLA BUMDES TIRTA ARUM DESA
SUMURJOMBLANGBOGO DITINJAU DARI PRINSIP *ISLAMIC*
*CORPORATE GOVERNANCE***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

KHOIRULANAM

NIM 4121162

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Anam
NIM : 4121162
Judul Skripsi : **Analisis Tata Kelola BUMDes Tirta Arum
Desa Sumurjomblangbogo Ditinjau dari
Prinsip *Islamic Corporate Governance***

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Mei 2025

Yang menyatakan,



Khoirul Anam

NIM. 4121162

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Khoirul Anam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Khoirul Anam**

NIM : **4121162**

Judul Skripsi : **Analisis Tata Kelola BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo Ditinjau dari Prinsip *Islamic Corporate Governance***

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Mei 2025

Pembimbing



Indah Purwanti, M.T.

NIP. 19870107 201903 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Kab Pekalongan Kode Pos 51161
Website : www.febi.uingusdur.ac.id | email : febi.uingusdur@ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **Khoirul Anam**
NIM : **4121162**
Judul : **Analisis Tata Kelola BUMDes Tirta Arum Desa
Sumurjomblangbogo Ditinjau dari Prinsip *Islamic
Corporate Governance***
Dosen Pembimbing : **Indah Purwanti, M.T.**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag.
NIP. 197502111998032001

Penguji II

Imahda Khoiri Furqon, M.Si.
NIP. 198312252019031004

Pekalongan, 17 Juni 2025
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. A.M. Muh/Khafidz Ma'shum, M.Ag.
NIP. 197806162003121003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانًا مَرصُوصًا

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.

(Q.S. As-Saff [61]: 4)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari peneliti kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Kedua orang tua peneliti yaitu Bapak Zaenuri dan Ibu Rusmini, yang tak kenal lelah berjuang membesarkan dan menghidupi dari kecil hingga dewasa, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Tanpa dukungan dan doa mereka, peneliti tidak akan mampu menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Fatwatul Hidayah, Benny Kurniawan Abadi, Hendi Setiawan, Sri Rejeki Istiani dan Farkhan Kurniawan selaku kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan tiada henti dalam melaksanakan kuliah dan menyelesaikan skripsi.
3. Kedua keponakan peneliti yang lucu-lucu Nuraisha Anindita Khairinniswa dan Nuraruna Novan Airlangga yang selalu mewarnai hari-hari peneliti.
4. Ibu Indah Purwanti, M.T., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan masukan serta arahan dari awal proses bimbingan hingga pengerjaan skripsi selesai.
5. Bapak Ardiyan Darutama, M.Phil., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam perkuliahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
6. Noviana, yang selalu mendukung dan membersamai langkah di masa perkuliahan hingga selesainya skripsi.
7. Zidni Arfani, Yusuf Agung Saputra, M. Risqi Harywibowo, M. Riyyan, Khotibul Umam dan seluruh Keluarga Besar SHAE 21 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani dan berjuang bersama selama di bangku perkuliahan hingga meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

ABSTRAK

KHOIRUL ANAM. Analisis Tata Kelola BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo Ditinjau dari Prinsip *Islamic Corporate Governance*.

BUMDes merupakan salah satu instrumen efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Kabupaten Pekalongan memiliki total 201 BUMDes namun hanya 1 BUMDes yang mendapat kategori maju berdasarkan pemeringkatan tahun 2024 yaitu BUMDes Tirta Arum. Padahal dengan pengelolaan yang baik, BUMDes mampu menciptakan peluang ekonomi baru. Oleh karena itu penelitian ini tidak hanya mengkaji tata kelola BUMDes Tirta Arum tetapi juga menganalisis apakah prinsip *Islamic Corporate Governance* diimplementasikan dan berdampak baik bagi tata kelola BUMDes Tirta Arum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan implementasi prinsip *Islamic Corporate Governance* memiliki dampak baik bagi tata kelola BUMDes. Prinsip tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan maupun pengawasan tata kelola BUMDes sehingga unit-unit usaha dapat berjalan dengan baik. Meningkatnya kepercayaan serta citra dan reputasi BUMDes menjadikan pelanggan percaya menggunakan produk maupun kerjasama dengan unit-unit usaha dan berdampak baik bagi kemajuan BUMDes. Prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* dapat menjadi acuan bagi BUMDes di Kabupaten Pekalongan untuk menjalankan tata pengelolaan sehingga meningkatkan kualitas BUMDes. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam konsep pengembangan tata kelola BUMDes serta berimplikasi praktis pada peningkatan tata kelola BUMDes dengan mengimplementasikan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* dalam perumusan strategi pengelolaan BUMDes.

Kata Kunci: BUMDes, Tata Kelola, *Islamic Corporate Governance*

ABSTRACT

KHOIRUL ANAM. Analysis of the Governance of BUMDes Tirta Arum, Sumurjomblangbogo Village in View of the Principles of Islamic Corporate Governance.

BUMDes is one of the effective instruments for promoting rural economic growth by utilising local resource potential. Pekalongan Regency has a total of 201 BUMDes, but only one BUMDes has been categorised as advanced based on the 2024 ranking, namely BUMDes Tirta Arum. However, with good management, BUMDes can create new economic opportunities. Therefore, this study not only examines the governance of BUMDes Tirta Arum but also analyses whether the principles of Islamic Corporate Governance are implemented and have a positive impact on the governance of BUMDes Tirta Arum. This research is a field study using a qualitative approach. It utilises primary data collected through interviews, observations, and documentation, as well as secondary data obtained from books, articles, and related publications. The results of the study indicate that the implementation of Islamic Corporate Governance principles has a positive impact on BUMDes governance. These principles are able to increase public trust and encourage active participation from the community in activities and oversight of BUMDes governance, enabling business units to operate effectively. The increased trust, image, and reputation of BUMDes lead customers to trust the products and collaborate with business units, thereby positively impacting the progress of BUMDes. The principles of Islamic Corporate Governance can serve as a reference for BUMDes in Pekalongan Regency to implement management practices that enhance the quality of BUMDes. This research contributes theoretically to the concept of BUMDes governance development and has practical implications for improving BUMDes governance by implementing transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in the formulation of BUMDes management strategies.

Keywords: BUMDes, Governance, Islamic Corporate Governance

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT. karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. A.M. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Muhammad Aris Safi'i, M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Indah Purwanti, M.T. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Ardiyan Darutama, M.Phil. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan bimbingan perkuliahan dan ilmunya dari awal hingga akhir dan memberikan arahan pembuatan judul skripsi sebagai langkah awal tersusunnya skripsi ini.
7. Pihak BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo yang sudah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan.
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan spiritual.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Teori <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	17
B. Teori <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG).....	20
C. Desa dan Pembangunan Desa	35
D. Badan Usaha Milik Desa.....	37
E. Telaah Pustaka.....	38
F. Kerangka berpikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Setting Penelitian.....	51
D. Subjek dan Objek Penelitian	51
E. Sumber Data	52

F. Teknik Pengumpulan Data	53
G. Teknik Keabsahan Data.....	55
H. Metode Analisis Data	56
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
B. Sistem Tata Kelola BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo.....	61
C. Tata Kelola BUMDes Tirta Arum Menurut <i>Islamic Corporate Governance</i>	96
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Keterbatasan Penelitian	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	I
A. Surat Izin Penelitian	I
B. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	II
C. Dokumentasi Observasi.....	III
D. Dokumentasi Wawancara Pengurus BUMDes Tirta Arum	IV
E. Dokumentasi Wawancara Mitra BUMDes Tirta Arum	VI
F. Dokumentasi Wawancara Masyarakat Desa Sumurjomblangbogo.....	VIII
G. Pedoman Wawancara.....	IX
H. Hasil Wawancara.....	XV
RIWAYAT HIDUP PENULIS	L

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - žukira

يَذْهَبُ - yažhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَؤُلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
اِ... اِي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis atas
اُ...	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ī	i dan garis atas

Contoh

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

D. Ta' marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah Hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah Sedangkan

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatulaṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

-al-Madīnatul-Munawwarah

طَالِحَةٌ - talḥah

E. *Syaddah*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرِّ -al-birr

الْحَجِّ -al-ḥajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam pedoman transliterasi ini, kata itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

الرَّجُلِ - ar-rajulu

السَّيِّدِ - as-sayyidu

السَّمْسِ - as-syamsu

القَلَمِ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna

التَّوَّءُ - an-nau'

شَيْءٍ - syai'un

إِنَّ - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn

-Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلَ -Ibrāhīm al-Khalīl

- Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhimajrehāwamursahā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasl

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

-Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn

-Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdulillāhirabbil al-'ālamīn

-Alhamdulillāhirabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan. Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Naṣrunminallāhiwafathunqarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً

-Lillāhi al-amrujamī'an

-Lillāhil-amrujamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāhabikullisyai'in 'alīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Tabel Pemeringkatan BUMDes.....	4
Tabel 1. 2. Data Pemeringkatan BUMDes Kabupaten Pekalongan Tahun 2024	6
Tabel 3. 1. Daftar Informan Penelitian.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Pemeringkatan BUMDes Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023	5
Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir	47
Gambar 4. 1. Struktur Kepengurusan BUMDes Tirta Arum.....	59
Gambar 4. 2. Sosial Media BUMDes Tirta Arum.....	63
Gambar 4. 3. Musyawarah BUMDes Tirta Arum	64
Gambar 4. 4. Kegiatan Lomba BUMDes Tirta Arum	67
Gambar 4. 5. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Pengurus	71
Gambar 4. 6. Pengawasan dan Peninjauan oleh Pihak Eksternal	73
Gambar 4. 7. Program CSR BUMDes Tirta Arum	81
Gambar 4. 8. Akses Kritik dan Saran Melalui Sosial Media	89
Gambar 4. 9. Musyawarah Desa Sumurjomblangbogo	90
Gambar 4. 10. Akses Rekrutmen Karyawan BUMDes Tirta Arum	93
Gambar 4. 11. Informasi Mitra Pedagang Kantin BUMDes.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi desa adalah upaya sistematis untuk menyejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada pengembangan potensi lokal. Proses ini mencakup peningkatan infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Selain itu, pembangunan ekonomi desa juga melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, dukungan terhadap usaha kecil dan menengah, serta akses ke sumber daya dan teknologi. Pentingnya pembangunan ekonomi masyarakat desa terletak pada kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah desa dengan wilayah kota. Dengan memperkuat ekonomi desa, tidak hanya kesejahteraan penduduk desa yang meningkat, tetapi juga ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan (Murthi, 2023).

Salah satu program pembangunan ekonomi desa di Indonesia adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan peraturan Permendagri No. 39 Tahun 2010 dan UU Pasal 1 Ayat 6 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Wahed et al., 2020). BUMDes merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan setempat.

Melalui terbentuknya BUMDes, peluang usaha dapat dikelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan warga, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, BUMDes juga dapat berfungsi sebagai wadah kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak swasta, yang bersama-sama berkontribusi dalam mengembangkan infrastruktur, pendidikan, serta pelayanan masyarakat di desa (Hakim et al., 2022). Melalui pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, BUMDes dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang mampu membawa desa menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mengelola seluruh potensi ekonomi desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam kegiatan pengembangan potensi ekonomi desa. Namun, sudah 10 tahun lebih Undang-Undang (UU) Desa diberlakukan, namun misi untuk mewujudkan desa yang mandiri belum juga terwujud (Fitriani, 2024). BUMDes perlu menerapkan prinsip tata kelola yang profesional dan transparan dengan penyusunan struktur organisasi yang jelas, sistem akuntansi yang akurat, serta mekanisme pengawasan yang partisipatif melibatkan masyarakat.

Pertumbuhan BUMDes di Indonesia menjadi stagnan dikarenakan terjadi gap antara persepsi tata kelola oleh pemerintah dan juga pengelola BUMDes. Menurut Fitriani (2024) dalam penelitiannya menyatakan pemerintah mempersepsikan bahwa kinerja utama yang diharapkan dari BUMDES adalah pada

kinerja keuangan, seperti kontribusi BUMDES terhadap PADes, jumlah pendapatan, nilai aset yang dikelola atau laba. Akan tetapi sebaliknya, pengelola BUMDES mendefinisikan kinerja dengan lebih luas tidak hanya pada keuangan, melainkan pada kontribusi sosial seperti seperti jumlah warga desa yang dipekerjakan, jumlah gaji yang dibayarkan, jumlah subsidi, tunjangan dan sumbangan yang diberikan untuk mendanai kegiatan sosial, membantu warga desa miskin, hingga kinerja keberlanjutan lingkungan desa (Fitriani, 2024).

Pemeringkatan BUMDes ini perujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut dirumuskan bahwa pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kementerian terkait yang bertugas untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUMDes setiap bulan februari tahun berjalan dan mengukur kinerja BUMDes dari tahun sebelumnya. Aspek-aspek dalam pemeringkatan BUMDes adalah kelembagaan, manajemen, usaha BUMDes, kerja sama atau kemitraan, aset dan permodalan, administrasi pelaporan dan akuntabilitas, dan keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa (Kementerian Desa, 2021). Aspek-aspek di atas kemudian dinilai oleh tim khusus dari Kementerian terkait. Kemudian BUMDes akan dikelompokkan menjadi empat kategori atau klasifikasi berdasarkan skor penilaian yang didapatkan saat pemeringkatan. Seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1. Tabel Pemeringkatan BUMDes

No.	Level	Peringkat/Klasifikasi	Skor
1.	A	Maju	$\geq 85 - 100$
2.	B	Berkembang	$\geq 70 - 85$
3.	C	Pemula	$\geq 55 - 70$
4.	D	Perintis	< 55

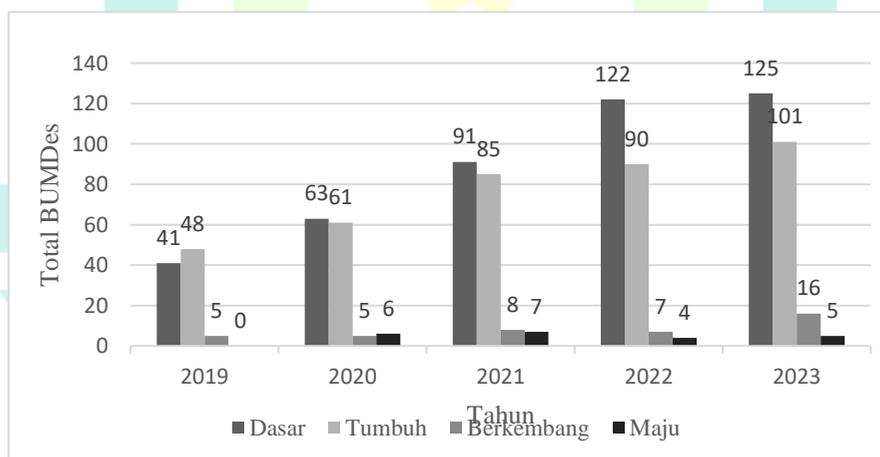
Sumber: *Permendes RI Nomor 3 Tahun 2021*

Kabupaten Pekalongan memiliki karakteristik unik yang membuatnya layak menjadi objek penelitian tata kelola BUMDes. Pertama, wilayah ini menggabungkan potensi agraris, industri kreatif, dan wisata alam, sehingga BUMDes di sini menghadapi kompleksitas pengelolaan yang berbeda dibanding daerah lain. Kedua, berdasarkan data Dinas PMD Kabupaten Pekalongan 2024, hanya sekitar 1 BUMDes dan 4 BUMDesma di Pekalongan yang dapat dikatakan sangat baik dan memiliki kategori Maju, mengindikasikan masalah serius dalam tata kelola BUMDes. Selain itu, Pemkab Pekalongan sedang gencar mendorong program “BUMDes *Go Digital*”, namun implementasinya masih terkendala kapasitas SDM dan sistem pengawasan isu yang kurang dieksplorasi dalam studi-studi BUMDes di daerah lain.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan membentuk regulasi mengenai BUMDes dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa kemudian disempurnakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan nomor 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa. Regulasi tersebut menjadi

dasar berdirinya BUMDes dan BUMDesma di Kabupaten Pekalongan dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa. Akan tetapi pengembangan BUMDes rasanya masih belum optimal dalam meningkatkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warga di Kabupaten Pekalongan. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya BUMDes yang dapat dikategorikan berkembang dan maju.

Hasil pemeringkatan menggambarkan kinerja BUMDes sehingga dapat terukur seberapa banyak BUMDes yang telah mencapai kategori tertentu dan dapat dijadikan pijakan bagi *stakeholder* terkait untuk merumuskan kebijakan maupun strategi bagi peningkatan BUMDes di desa dan meningkatkan outputnya sebagai sarana menyejahterakan perekonomian desa dan menciptakan kemandirian desa. Berdasarkan sidesa.jatengprov.go.id tahun 2023, terdapat 247 BUMDes dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1. 1. Pemeringkatan BUMDes Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: <https://sidesa.jatengprov.go.id> (Diakses pada: 6 Juni 2024 pukul 20.26 WIB).

BUMDes di Kabupaten Pekalongan hingga akhir tahun 2023 berjumlah sebanyak 247 BUMDes. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 223 BUMDes. Meskipun BUMDes kategori dasar dan kategori tumbuh jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun namun hanya ada 16 BUMDes yang dapat dikategorikan sebagai BUMDes berkembang dan hanya ada 5 BUMDes yang dapat dikategorikan sebagai BUMDes maju di akhir 2023 (SIDesa, 2024). Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah pendirian BUMDes tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dari BUMDes yang telah ada untuk dapat meningkat menuju kategori yang lebih berkualitas.

Setiap tahun, pemerintah melalui Kementerian Desa selalu melakukan pemeringkatan untuk mengetahui perkembangan BUMDes di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Pekalongan. Data terbaru mengenai pemeringkatan BUMDes di Kabupaten Pekalongan juga diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan. Pemeringkatan BUMDes di wilayah Kabupaten Pekalongan belum lama selesai dan sudah melalui proses perekapan data. Gambaran mengenai jumlah BUMDes dan pemeringkatannya pada tahun 2024 dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Data Pemeringkatan BUMDes Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

Peringkat	BUMDes	BUMDesma
Maju	1	4
Berkembang	25	4
Tumbuh	55	2

Dasar	109	1
Total	190	11

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Data Pemeringkatan BUMDes Tahun 2024 Kabupaten Pekalongan. (Diakses pada: 17 Oktober 2024 pukul 09.07 WIB)

Data pemeringkatan terbaru yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa jumlah BUMDes yang terdaftar pada tahun 2024 justru menurun. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa menuturkan jumlah BUMDes menurun dikarenakan seleksi alam yang mana banyak BUMDes yang masih belum bisa konsisten dalam mempertahankan usahanya dikarenakan banyak faktor. Hal tersebut amat disayangkan karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang maju memiliki peran krusial dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa (Sastika & Batubara, 2023). Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat mengurangi angka kemiskinan di desa.

Salah satu faktor penyebab BUMDes tidak dapat bertahan maupun berkembang adalah kurangnya penerapan tata kelola yang baik dalam manajemen BUMDes itu sendiri sehingga menjadi tidak sukses (Tarigan et al., 2024). Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Pekalongan salah satu faktor penghambat perkembangan BUMDes adalah kepemimpinan, manajerial dan tata kelola (Waluyo, 2024). Padahal BUMDes dengan tata kelola yang baik dapat

berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Keberadaan BUMDes juga dapat mendorong partisipasi aktif warga desa dalam kegiatan ekonomi, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Lebih jauh lagi, BUMDes yang maju dapat menjadi motor penggerak inovasi dan diversifikasi ekonomi desa, memungkinkan penduduk desa untuk tidak hanya memiliki pekerjaan di sektor pertanian saja, akan tetapi juga dapat mengembangkan sektor lain seperti pariwisata, kerajinan tangan, dan usaha kreatif lainnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah kajian mengenai analisis tata kelola BUMDes dalam meningkatkan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Pekalongan.

Tolak ukur dari baiknya pengelolaan sebuah lembaga atau perusahaan dapat di lihat menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* atau biasa disingkat GCG. *Good Corporate Governance* merujuk pada prinsip-prinsip fundamental dalam proses serta mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada regulasi, perundang-undangan, dan etika bisnis (Rahmi et al., 2022). Baik buruknya tata kelola BUMDes tidak hanya dapat kita kaji dari sisi pengelolaan lembaganya yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan materi saja tetapi juga dapat ditinjau dari sisi spiritualitas. Hal tersebut bisa tercapai ketika setiap manusia dalam melakukan aktivitas terutama ekonomi senantiasa berpedoman pada prinsip dasar Islam. Sesuai dengan pendapat Umar Chapra yang mengemukakan Manusia sebagai khalifah atau pemimpin memiliki makna memegang peran yang besar dalam menentukan arah dan mengelola segala sesuatu yang menjadi kepentingan segala makhluk yang ada di seluruh dunia (Mahri et al., 2021).

Tata kelola perusahaan tidak hanya sebagai salah satu prinsip utama dalam menjalankan perusahaan agar mencapai kinerja yang baik akan tetapi juga harus dapat memastikan bahwa kegiatan bisnis dapat dipantau dan menjadi pengontrol kegiatan operasional perusahaan. Lingkungan bisnis saat ini dengan latar budaya yang beragam oleh karena itu diperlukan komitmen atau prinsip untuk mengadopsi dan menerapkan aturan yang lebih kuat untuk menghadapi perubahan dari masyarakat. Hal tersebut menyiratkan tata kelola perusahaan harus dapat mencegah perilaku yang tidak adil serta kecurangan sehingga meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan serta sebagai menjadi sebuah kerangka pengawasan pada kondisi lingkungan masyarakat yang beragam termasuk dalam lingkungan masyarakat dengan mayoritas beragama Islam. Pentingnya kepercayaan dan komitmen dari pengelolaan yang mengedepankan kejujuran, keseimbangan, dan kehalalan dan kepatuhan syariah dapat berpengaruh besar dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Islam memiliki konsep yang lebih komprehensif terkait dengan tata kelola perusahaan yaitu *Islamic Corporate Governance* yang disingkat *ICG* merupakan turunan dari konsep *Good Corporate Governance* dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti tauhid, taqwa dan ridha, ekuilibrium, dan kemaslahatan (Hasanah, 2022). Keunggulan utama *Corporate Governance* dalam perspektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah Swt. sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan Etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. *Islamic Corporate Governance* dijalankan tidak

hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan Syariat Islam secara utuh dan sempurna (Pahlevi, 2021). Dengan dasar keyakinan kepada Allah Swt. maka akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil, dan akuntabel. Melalui nilai-nilai tersebut dapat membuat tata kelola BUMDes menjadi semakin baik. Namun kajian mengenai tata kelola perusahaan dengan prinsip *Islamic Corporate Governance* belum banyak dilakukan dalam kajian tata kelola BUMDes. Prinsip tersebut lebih banyak diterapkan dalam lembaga perekonomian syariah. Analisis tata kelola BUMDes lebih banyak justru menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* yang lebih umum padahal mayoritas masyarakat di Kabupaten Pekalongan adalah muslim.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti melihat gap yang terjadi dalam isu analisis tata kelola BUMDes di Kabupaten Pekalongan. Yang pertama, perkembangan BUMDes di Kabupaten Pekalongan menjadi *stagnan* dan cenderung tidak berkembang disebabkan karena banyaknya BUMDes yang belum memiliki dan mengimplementasikan prinsip tata kelola yang baik sehingga tidak dapat bertahan. Dapat disimpulkan dari data pemeringkatan yang menunjukkan bahwa perkembangan BUMDes yang *stagnan* pada tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan pembentukan BUMDes tidak diiringi dengan strategi pengelolaan BUMDes yang berkelanjutan. Yang kedua, gap dalam penerapan prinsip tata kelola dalam kajian tata kelola BUMDes yang mana prinsip *Islamic Corporate Governance* masih belum dieksplorasi untuk menganalisis tata kelola BUMDes padahal prinsip ini menginterkoneksi nilai-nilai Islam sesuai dengan karakteristik mayoritas muslim di

Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menjawab gap dalam literatur mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat memperkuat tata kelola BUMDes, khususnya dalam konteks lokal Kabupaten Pekalongan.

Kajian dari tata kelola BUMDes menjadi penting dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi prinsip *Islamic Corporate Governance* pada BUMDes dan pengaruhnya pada baik buruknya tata pengelolaan BUMDes itu sendiri. Pemerintah sendiri telah melakukan pemeringkatan terhadap pengelolaan BUMDes dalam berbagai aspek untuk mengklasifikasi BUMDes menjadi beberapa kategori seperti kategori perintis, kategori pemula, kategori berkembang, dan kategori maju. BUMDes dengan kategori maju memiliki skor yang tinggi sehingga menjadi tolak ukur sebagai BUMDes dengan pengelolaan yang sangat baik. Peneliti memilih BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sebagai objek penelitian. BUMDes tersebut dipilih karena merupakan BUMDes dengan kategori maju di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan data pemeringkatan BUMDes dan BUMDesma Kabupaten Pekalongan tahun 2024 yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan. BUMDes dengan peringkat maju adalah BUMDes dengan pengelolaan sangat baik yang dinilai melalui pemeringkatan BUMDes yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahun.

Peneliti memilih BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sebagai objek penelitian juga dikarenakan BUMDes ini memiliki pengelolaan usaha berbasis potensi lokal yang berkelanjutan berdasarkan penelitian dari Citradika (2024) yang menyatakan BUMDes Tirta

Arum Desa Sumurjomblangbogo merencanakan akan melakukan ekspansi usaha dengan mewujudkan Pamsimas, ketahanan pangan, optimalisasi KUBE, wisata edukasi, meeting room, dan termasuk pengelolaan bengkok desa untuk, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya air dan pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian desa (Citradika et al., 2023). Berdasarkan penelitian dari Nurhayati (2023) BUMDes ini juga menonjol karena upayanya memberdayakan masyarakat melalui program-program inklusif yang dikelola secara partisipatif dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat (Nurhayati et al., 2023). Selain itu, BUMDes Tirta Arum mengimplementasikan program “BUMDes *Go Digital*” dibuktikan oleh penelitian dari Affa (2024) menyatakan meningkatnya pengetahuan pengelola KUBE dan BUMDES tentang teknologi marketing, meningkatkan impresi dan pengetahuan masyarakat dari promosi digital yang dijalankan sebesar 271%, dan meningkatnya kunjungan fisik ke kolam renang tirta arum dan ke kantin KUBE sebesar 52% dibanding sebelum promosi digital dijalankan. Selain itu BUMDes Tirta Arum juga menjadi contoh unik bagaimana sebuah BUMDes berupaya menerapkan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel meski dengan sumber daya terbatas (Adriyana et al., 2024), sehingga layak dijadikan objek analisis tata kelola.

Melalui asumsi yang telah terbangun melalui uraian di atas, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam pada BUMDes yang pengelolaannya sangat baik untuk menilai apakah prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* diimplementasikan dalam pengelolaan BUMDes tersebut. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai prinsip tata kelola bagi BUMDes serta dapat

dijadikan sebagai acuan dalam tata pengelolaan BUMDes. Melalui penelitian ini dapat dilihat bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* dapat diterapkan dan apakah prinsip tersebut bisa berdampak baik bagi tata kelola dan kemajuan BUMDes di Kabupaten pekalongan. Sehingga BUMDes di Kabupaten Pekalongan dapat menjalankan tata kelola BUMDes menjadi semakin baik dan pada akhirnya membuat BUMDes-BUMDes di Kabupaten Pekalongan dapat meningkat dan menjadi semakin maju.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem tata kelola yang diterapkan oleh BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo?
2. Bagaimana analisis tata kelola BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo ditinjau dari prinsip *Islamic Corporate Governance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sistem tata kelola yang diterapkan oleh BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo.
2. Menganalisis tata kelola BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo ditinjau dari prinsip *Islamic Corporate Governance*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait tata kelola BUMDes ditinjau dengan prinsip *Islamic Corporate Governance* sehingga dapat diimplementasikan dalam pengembangan BUMDes menjadi lebih baik lagi dan memperkaya khasanah kajian Ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran secara objektif mengenai pengelolaan BUMDes yang dianalisis melalui prinsip *Islamic Corporate Governance* sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi BUMDes di seluruh Kabupaten Pekalongan dalam menerapkan strategi tata kelola BUMDes melalui prinsip *Islamic Corporate Governance*. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan informasi dalam membentuk kebijakan yang sesuai bagi pengembangan BUMDes melalui tata pengelolaan yang baik sehingga menciptakan kesejahteraan dan kemandirian bagi desa.

E. Sistematika Pembahasan

Proses pembahasan dalam penelitian harus disajikan dengan sistematis dan mudah dipahami. Oleh karena itu dalam membahas dan menyajikan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini berisi pendahuluan di mana fenomena serta permasalahan yang menjadi topik penelitian serta urgensi dari penelitian ini

dijabarkan sehingga pembaca dapat memahami arah dari penelitian ini implementasinya untuk apa. Isi dari bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori: Bab ini berisi teori-teori yang dijadikan sebagai pondasi awal dalam mengidentifikasi permasalahan serta fenomena yang terjadi, selain itu bab ini juga menyajikan telaah pustaka dari penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian serta kerangka berpikir yang menjadi peta jalan dari arah penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai landasan berpikir bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini berisi karakteristik metode, pedoman, maupun cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan penelitian, mengumpulkan data, mengolah data sesuai dengan pedoman penelitian yang komprehensif sehingga dapat menjamin keakuratan data yang menjadi inti dari penelitian ini. Isi dari bab ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, serta metode analisis data.

BAB VI Analisis Data dan Pembahasan: Bab ini nantinya akan berisi tentang gambaran umum dari subjek serta fenomena yang menjadi topik penelitian, data yang telah diolah serta pembahasan yang disusun dan dikembangkan sesuai kebutuhan dari penelitian ini

BAB V Pentutup: Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta keterbatasan penelitian yang dilakukan sehingga didapatkan rincian singkat mengenai implikasi dari penelitian yang dikaji.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan serta hasil pembahasan penelitian di atas, maka dengan ini peneliti menjabarkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem tata kelola yang diterapkan oleh BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo yang pertama dari segi transparansi BUMDes memanfaatkan dua jenis media dalam efektivitas penyampaian informasi yakni media *online* dengan *website*, sosial media, serta media *offline* dengan papan informasi, kantor sebagai tempat pelayanan, dan forum musyawarah. Kedua untuk akuntabilitas BUMDes merinci segala tugas dan tanggungjawab setiap organ dalam AD/ART serta Surat Keputusan Direktur BUMDes untuk memperjelas tugas serta tanggungjawab namun belum memiliki sistem penilaian kinerja karyawan yang menyeluruh. Ketiga untuk responsibilitas BUMDes menerapkan sistem pengawasan dengan tiga pilar utama yaitu pengawas, Direktur, dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta menerapkan CSR dengan berbagai macam program serta sasaran yang tepat. Keempat untuk independensi sistem yang diterapkan BUMDes adalah selalu mengambil keputusan dengan jalan musyawarah dan memastikan bahwa setiap keputusan besar disepakati seluruh anggota serta selalu bersikap netral dan tidak membiarkan pihak manapun mendominasi untuk kepentingan diluar kepentingan BUMDes. Kelima untuk *fairness* BUMDes membuka kesempatan seluruh masyarakat

untuk menyampaikan aspirasi dengan media *online* maupun *offline* serta menentukan kriteria penerimaan karyawan dengan mementingkan skill individu serta memberikan pelayanan dan perlakuan yang setara untuk memastikan keadilan dan kewajaran dijalankan dengan baik.

2. Sistem tata kelola yang diterapkan BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo telah sesuai dengan Prinsip *Islamic Corporate Governance*. Pertama untuk transparansi keterbukaan informasi dan sistematika penyampaian informasi telah sesuai dengan indikator transparansi dan perilaku *shiddiq*. Kedua akuntabilitas telah sesuai dengan perilaku *shiddiq* dan amanah walaupun masih ada kendala dikarenakan sumberdaya manusia yang terbatas serta belum memiliki sistem penilaian kinerja yang menyeluruh. Ketiga responsibilitas yang dilakukan telah sesuai dengan nilai perilaku amanah, *tabligh*, *fathanah* karena menyampaikan berbagai program bantuan yang menjadikan kebermanfaatannya untuk sekitar dengan sasaran yang sesuai. Keempat independensi telah sesuai dengan nilai perilaku *shiddiq* dan amanah dengan menjalankan pengelolaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Kelima *fairness* telah dilakukan sesuai dengan nilai perilaku *shiddiq* dan amanah melalui perlakuan yang setara dan wajar dalam memenuhi kesepakatan transaksi maupun bagi hasil bagi seluruh pihak serta membuka kesempatan yang setara dalam perekrutan karyawan dan penerimaan kritik, saran, dan masukan.

B. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian telah diupayakan sedemikian rupa untuk memberikan gambaran yang maksimal mengenai implikasi prinsip *Islamic Corporate Governance* pada tata kelola BUMDes Tirta Arum Desa Sumurjomblangbogo agar dapat mudah dipahami oleh pembaca, akan tetapi peneliti tidak memungkiri adanya keterbatasan dalam penelitian ini antara lain penelitian membatasi penelitian pada ruang lingkup tata kelola BUMDes berdasarkan prinsip *Islamic Corporate Governance* saja. Selain itu penelitian juga terbatas pada penggunaan metode penelitian kualitatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriyana, R., Syaiful, A., Surendra, A., & Widya, M. (2024). Evaluating the Growth of Village Revenue by Enhancing Village-Owned Enterprises (BUMDes) Through the Application of Good Corporate Governance. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(3).
- Arifin, R. N., Wijayanto, A., & Purbawati, D. (2023). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun 2023). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 12(3), 977–985.
- As-saif, M. R. (2024). Peran Mata Pelajaran Kewirausahaan terhadap Tumbuhnya Minat Berwirausaha Siswa SMAN 16 Bandung. *Leader: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 239–248. <https://doi.org/10.32939/ljmpi.v2i2.4080>
- Asfa, M. N., & Basir, A. (2025). Pendidikan Toleransi dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Implementasi Pada Tri Pusat Pendidikan. *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, 4(1), 31–44.
- Aulia, M. A., Rifai, A., & Rosnita. (2024). Analisis Tata Kelola Bumdes di Provinsi Riau. *Jurnal Agri Sains*, 8(2), 207.
- Citradika, D. putri, Mahirun, & Ayuningrum, A. P. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Prinsip Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(2), 184–197. <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v4i2.5198>
- Eikman, A., & Vinuzia, M. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di DesaTua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(3).
- Fitriani, D. (2024). Satu Dekade UU Desa: Mengapa BUMDES Masih Jalan di Tempat. Diambil dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7475398/satu-dekade-uu-desa-mengapa-bumdes-masih-jalan-di-tempat?page=3>
- Ghony, D. M., Wahyuni, S., & Almanshur, F. (2020). *Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif* (1 ed.). Bandung: PT Refika Aditamma.
- Hakim, L., Svinarky, I., & Junaedi. (2022). BUM Desa Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru (Sebuah Gagasan Untuk Desa di Indonesia). *Penerbit Lakeisha*, (February), 828. Diambil dari https://www.researchgate.net/profile/Fx-Anjar-Laksono/publication/358468492 BUM_desa_sebagai_kekuatan_ekonomi_baru_sebuah_gagasan_untuk_desa_di_Indonesia/links/6203d41bc83d2b75dffd64b3/BUM-desa-sebagai-kekuatan-ekonomi-baru-sebuah-gagasan-untuk-desa-di-In
- Hasanah, S. M. (2022). *Islamic Corporate Governance. Review of Islamic Economics* (1 ed., Vol. 9). Mataram: UIN Mataram Press.
- Hudri, M. (2024). Diskursus Taat Pemerintah Perspektif Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an (Studi Pembacaan QS. Al- Nisa' (4): 59). *Rausyan Fikr*, 20(1),

38–39.

- Iskandar, J., Engkus, Sakti, F. T., Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1–11. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>
- Judijanto, L., Atmaja, U., Irawati, Juhandi, D., Kusumastuti, S. Y., & Chaniago, N. (2025). *Ekonomi Pembangunan Pedesaan*. (Efitra, Ed.) (1 ed.). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kementerian Desa, P. Permendes RI Nomor 3 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia § (2021). Diambil dari www.peraturan.go.id
- Lubis, Z. (2024). Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 282: 3 Kelompok yang Ditangguhkan Transaksi Keuangannya. Diambil dari <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-282-3-kelompok-yang-ditangguhkan-transaksi-keuangannya-JB8Px>
- Lusy, & Panjaitan, T. W. S. (2020). *Good Corporate Governance Bagi BPR: Pedoman Penerapan Tata Kelola*. (M. Mochklas, Ed.) (1 ed.). Serang: C.V. AA. Rizky.
- Mahri, A. J. W., Cupian, Arif, M. N. R., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., ... Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*.
- Muchlis, S., & Resky. (2021). Implementasi Islamic Corporate Governance dalam Mengelevisi Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1(2), 121–129.
- Murthi, N. W. (2023). Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Berkewirausahaan Sosial. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 1835–1848.
- Naqqiyah, M. S., Aziz, H., & Muslimin, M. (2024). Komunikator Modern Perspektif AL-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 13-14. *JDARISCOMB: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(2), 113–122.
- Nasution, C. A. B., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Islamic Corporate Governance dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Sukaramai). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8).
- Niar, U. S. I., Otevendi, T. W., & Irawan, D. (2023). Analisis Tata Kelola Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip Corporate Governance di Kabupaten Magetan. *Value*, 18(3), 1081–1091.
- Nugraha, S. L., & Endraswati, H. (2022). Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Pesantren. *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 8(2), 119–136. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v8i2.13910>
- Nurhayati, S., Sunarjo, W. A., & Susilo, D. (2023). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penggerak Desa Wisata Terintegrasi di Desa

- Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. *Journal of Social Community Services*, 2(1), 20–25. Diambil dari <https://socircle.xjurnal.com/ojs/index.php/socircle/article/download/8/8>
- Pahlevi, R. W. (2021). *Islamic Corporate Governance: Konsep Dasar dan Implementasi Nilai-Nilai Syariah* (1 ed.). Yogyakarta: STIM YKPN.
- Purwaningsih, S. B., Mediawati, N. F., & Mursyidah, L. (2023). Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6, 840–850.
- quran.nu.or.id. (n.d.). Tafsir Q.S. Az-Zummar Ayat 18. Diambil dari <https://quran.nu.or.id/az-zumar/18>
- Rahmi, F., Putri, Y., & Elfiandri. (2022). Analisis Implementasi Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Desa Ridan Permai di Kabupaten Kampar. *Jurnal Al-Iqtishad*, 18(2), 325–347.
- Rizal, S., Najari, M., & Habibillah, M. H. (2022). Pendidikan Akhlak dalam Surat As-Saff. *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 26–43.
- Sastika, M., & Batubara, C. (2023). Peluang Pengembangan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Ekonomi Syariah sebagai Solusi Pembangunan Desa yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 3268–3281.
- SIDesa, J. T. (2024). Data Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pekalongan. Diambil dari <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/bumdes/33.26>
- Siregar, Y. S., Darwis, M., Baroroh, R., & Andriyani, W. (2022). Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan. *JIKM: Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 2(1), 69–75. <https://doi.org/10.56972/jikm.v2i1.33>
- Sunarso, B. (2023). *Sosiologi Pembangunan Desa* (1 ed.). Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Syafikri, A. F., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif Good Governance Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(2), 208–221.
- Tarigan, R., Harahap, R. H., & Heri, K. (2024). Tata Kelola BUMDes Gajah Mandiri Desa Bakal Gajah Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Perspektif*, 13(4), 994–1003. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i4.12257>
- Tenda, C. A., Mangindaan, J. V., & Punuindoong, A. Y. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Desa Tounelet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Productivity*, 3(2), 162.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 6 JDIH BPK § (2014). Indonesia. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Wada, F. H., Pertiwi, A., Hasiolan, M. I. S., Lestari, S., Sudipa, I. G. I., Patalatu, J. S., ... Rahman, A. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (1 ed.). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wahed, M., Asmara, K., & Wijaya, R. S. (2020). Pengembangan Ekonomi Desa Dengan Instrumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA). *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 58–70. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5438>
- Waluyo, H. (2024). Raperda RPJPD Tahun 2025-2045 dan BUMDes, Ini Pandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pekalongan. Diambil dari <https://radarpekalongan.disway.id/read/71668/raperda-rpjpd-tahun-2025-2045-dan-bumdes-ini-pandangan-umum-fraksi-gerindra-dprd-kabupaten-pekalongan>
- Yuliana, Nurhaliza, S., & Hayatunnisa. (2023). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(3), 240–247.
- Zakiah, S., & Fuadi, A. (2022). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mozaik Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *JEKsya*, 1(2), 120–129.
- Zuryaningsih, Y., Zuriana, C., Nanda, Y. J., & Atkiya, N. (2024). Pertunjukan Tari Dikee Pam di Desa Tuwi Eumpeuk Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. *Misterius: Publikasi Ilmu Seni dan Desain Komunikasi Visual*, 8(4), 164.